

Pemkot Rasionalisasi Anggaran, Program Prioritas Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi

BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan dana negara, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025.

Menurut Rahmad, kebijakan ini sedang dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan langkah-langkah rasionalisasi anggaran yang tepat. Rahmad menjelaskan bahwa program prioritas tetap berjalan meski ada efisiensi beberapa program di Pemerintah Kota Balikpapan akan mengalami rasionalisasi pada tahun 2025.

Namun, ia menegaskan bahwa program-program yang menjadi prioritas tinggi bagi masyarakat tetap dijaga dan tidak akan terpengaruh. "Salah satu contoh program prioritas yang tetap berjalan adalah program pendidikan dan BPJS kesehatan gratis untuk masyarakat," ujarnya baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Balikpapan untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa biaya tambahan.

Selain itu, program pendidikan yang juga menjadi prioritas Pemkot Balikpapan, menurut Rahmad, akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Pendidikan adalah sektor yang sangat penting dalam pembangunan daerah dan masa depan generasi penerus. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kelangsungan pendidikan di kota ini, baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun pengajaran.

Di sisi lain, Rahmad menambahkan bahwa rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan akan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial serta pengadaan perlengkapan yang tidak mendesak. "Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat, seperti kegiatan seremonial dan perlengkapan, akan kami rasionalisasi," tegasnya. Dengan langkah rasionalisasi yang tepat, Pemkot Balikpapan berharap dapat menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. **(le/ha/rm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pemkot Rasionalisasi Anggaran, Program Prioritas Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi, 14/02/2025

Catatan :

Berdasarkan Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 gubernur dan bupati/wali kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

